



Global Coalition to **Protect
Education from Attack**

Pertanyaan dan Jawaban Mengenai Deklarasi Sekolah Aman

Apa yang dimaksud dengan Deklarasi Sekolah Aman?

Deklarasi Sekolah Aman adalah komitmen politik antar pemerintah yang memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk menunjukkan dukungan atas perlindungan siswa, guru, sekolah, dan universitas dari serangan selama konflik bersenjata; pentingnya kelangsungan pendidikan selama konflik bersenjata; dan implementasi langkah konkret untuk mencegah militer menggunakan sekolah-sekolah.

Pada Mei 2017, **Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa**, António Guterres, mendesak Negara Anggota untuk mendukung Deklarasi Sekolah Aman dalam laporannya pada Dewan Keamanan PBB mengenai perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata.

Deklarasi ini dikembangkan melalui sebuah proses konsultasi dengan negara-negara yang dipimpin oleh Norwegia dan Argentina di Jenewa pada awal 2015, dan dibuka untuk pengesahan pada Konferensi Oslo mengenai Sekolah Aman pada 29 Mei 2015.

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata, Leila Zerrougui, menggambarkan Deklarasi Sekolah Aman sebagai salah satu prestasi gemilang selama mandatnya, yang berakhir pada Maret 2017.

Apa saja manfaat pendidikan dalam situasi konflik?

Sekolah aman menyediakan informasi yang bisa menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak psikososial perang, dan dapat melindungi anak-anak dari perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan perekrutan oleh kelompok bersenjata. Gangguan dalam pendidikan dapat mengecilkan kemungkinan anak-anak kembali ke sekolah, bahkan ketika sekolah-sekolah tersebut dibuka. Dan, dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi pendapatan individu dan kemampuan suatu negara membangun kembali perekonomian. Mungkin, yang lebih penting bagi seorang anak adalah akses pada ruang aman untuk belajar, yang memberikan rasa normal, rutin, dan tenang di tengah kekacauan perang.

Gordon Brown **Utusan Khusus PBB untuk Pendidikan Global**, menyatakan bahwa “Perkembangan serangan yang mengerikan di sekolah-sekolah mesti berakhir. Penting bagi kita untuk menyatakan sekarang juga bahwa serangan di sekolah-sekolah dan universitas adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bahwa sarana pendidikan dipandang sebagai tempat berlindung yang aman.” Dia menyampaikan bahwa “setiap negara sekarang harus mendukung” Deklarasi Sekolah Aman.



Apa yang dilakukan negara-negara yang mendukung Deklarasi?

Dengan bergabung dalam Deklarasi tersebut, negara-negara berkomitmen untuk mengambil beberapa langkah yang masuk akal untuk memperkecil kemungkinan siswa, guru, sekolah, dan universitas diserang, serta mengurangi konsekuensi negatif saat serangan tersebut terjadi.

Langkah-langkah tersebut di antaranya:

- Menghimpun data yang dapat dipercaya mengenai serangan militer serta penggunaan sekolah dan universitas secara militer;
- Mendampingi korban serangan;
- Menyelidiki tuduhan atas pelanggaran hukum nasional dan internasional, dan mengadili pelaku bila perlu;
- Mengembangkan dan mempromosikan pendekatan “sensitif konflik” dalam pendidikan;
- Mengupayakan kelanjutan pendidikan selama konflik bersenjata;
- Mendukung agenda kerja PBB menyoal anak-anak dan konflik bersenjata; dan
- Menggunakan *Pedoman Perlindungan Sekolah dan Universitas dari Penggunaan Secara Militer selama Konflik Bersenjata (Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict)*, dan mengadopsinya ke dalam kebijakan dalam negeri dan kerangka operasional sejauh dan sesesuai mungkin.

Pada Agustus 2016, Dewan Perdamaian dan Keamanan **Uni Afrika** “mengimbau seluruh Negara Anggota yang belum bergabung, untuk mengesahkan Deklarasi Sekolah Aman.”

Deklarasi tersebut juga merupakan kerangka kerja untuk kolaborasi dan pertukaran, dan negara-negara pendukung sepakat untuk bertemu secara rutin untuk meninjau pelaksanaan Deklarasi dan penggunaan Pedoman tersebut.

Pada Juni 2015, **Dewan Keamanan PBB** menyampaikan “kekhawatiran mendalam bahwa penggunaan sekolah secara militer yang bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku, dapat menjadikan sekolah target sasaran serangan sehingga membahayakan keselamatan anak-anak,” dan mendorong “Negara-negara Anggota untuk mengambil tindakan nyata untuk mencegah penggunaan sekolah semacam itu oleh pasukan dan kelompok bersenjata.”

Bagaimana sebuah negara mendukung Deklarasi?

Pemerintah Norwegia saat ini merupakan pengumpul dukungan. Negara-negara dapat mengumumkan dukungan mereka kapan pun dengan merilis pernyataan publik dan/atau mengirimkan surat kepada



Global Coalition to **Protect
Education from Attack**

Kementerian Luar Negeri Norwegia lewat kedutaan-kedutaan besar atau misi permanen atau langsung pada Seksjon.for.humanitaere.sporsmal@mfa.no dan kjnn@mfa.no.

Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, dan **Utusan Khusus UNESCO untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi**, Forest Whitaker, telah mengimbau negara-negara untuk melipatgandakan upaya mereka dalam memastikan komitmen politik untuk melindungi sekolah-sekolah dan universitas, serta untuk mengikuti Deklarasi Sekolah Aman.

Apa yang dimuat dalam *Pedoman*?

Pedoman Perlindungan Sekolah dan Universitas dari Penggunaan Militer selama Konflik Bersenjata mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata (baik pasukan bersenjata negara maupun kelompok bersenjata non-negara) tidak menggunakan sekolah dan universitas untuk tujuan apapun dalam mendukung upaya militer. Tujuan utama Pedoman ini adalah melindungi dari risiko pasukan bersenjata dan kelompok bersenjata mengubah sekolah dan universitas menjadi target militer dengan menempati bangunannya dan memaparkan siswa dan guru pada konsekuensi serangan penuh bahaya. Meski telah diakui bahwa penggunaan tertentu tidak bertentangan dengan hukum konflik bersenjata, semua pihak harus berupaya menghindari pelanggaran atas keselamatan dan pendidikan siswa, dengan menggunakan Pedoman tersebut sebagai panduan tindakan yang bertanggung jawab.

Pedoman ini disusun berdasarkan langkah-langkah yang dapat dicapai. Mereka mengakui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata berhadapan dengan dilema yang pelik dan membutuhkan solusi pragmatis. Pedoman tersebut mencerminkan bukti atas langkah-langkah baik yang telah diterapkan beberapa pihak dalam konflik bersenjata untuk melindungi sekolah dan universitas selama operasi militer.

Pedoman ini dikembangkan selama beberapa tahun, melalui konsultasi dengan kementerian luar negeri, pertahanan, dan pendidikan; pasukan bersenjata; Komite Internasional Palang Merah (ICRC); masyarakat sipil; akademisi, dalam proses yang dipelopori Koalisi Global untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan (GCPEA) sejak 2012, dan dirampungkan di bawah kepemimpinan Norwegia dan Argentina pada 2014.

Komite Hak-Hak Anak PBB telah mendesak negara-negara untuk “memenuhi kewajiban mereka ... untuk memastikan bahwa sekolah adalah zona damai dan tempat untuk mengembangkan rasa ingin tahu intelektual dan respek untuk hak asasi manusia; dan untuk memastikan bahwa sekolah dilindungi dari serangan militer atau perampasan oleh militan.”

Apa saja yang ingin dicapai lewat Pedoman?



Pedoman ini tidak ditujukan mengikat secara hukum, namun untuk melengkapi hukum internasional mengenai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang berlaku. Pedoman tersebut tidak mengubah hukum yang berlaku, melainkan memfasilitasi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan menerapkan perubahan praktik dan perilaku. Pedoman tersebut ditujukan sebagai sarana meningkatkan kesadaran mengenai penggunaan sekolah secara militer, bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dan untuk memfasilitasi diskusi mengenai isu-isu perlindungan dan pendidikan yang lebih luas dalam konflik antar pasukan militer, pemerintah, dan lembaga non-negara. Diharapkan bahwa Pedoman ini dapat mendorong perubahan mentalitas dalam hal penggunaan sekolah secara militer dan universitas, melalui integrasi ke dalam kebijakan militer dan doktrin, dan langkah-langkah baik. Penerapan Pedoman sebaiknya disesuaikan dengan konteks dan kondisi negara masing-masing.

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyatakan: “ICRC mendukung proses pengesahan Pedoman dengan berkontribusi pada substansi dokumen... Kami memertimbangkan bahwa pada hakikatnya Pedoman ini tidak mengikat secara hukum dan tidak berupaya mengubah hukum yang berlaku. Kami memahami Pedoman ini sebagai mestinya, untuk mengubah perilaku yang mungkin mengarah pada berkurangnya penggunaan militer terhadap sekolah dan universitas... Kami juga memahami bahwa rancangan Deklarasi Sekolah Aman dalam segi itu... Kami memertimbangkan bahwa Pedoman ini dapat memberikan panduan praktis yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer yang berhubungan dengan keputusan mengenai penggunaan dan sasaran militer atas institusi-institusi yang didedikasikan untuk pendidikan. Oleh karena itu, kami juga mengimbau staf kami untuk memertimbangkan penggunaan Pedoman salah satunya sebagai referensi, dan telah secara aktif menyebarkan Pedoman di antara delegasi kami.”

Apa yang terjadi setelah negara-negara mengimplementasikan Deklarasi?

Banyak negara telah menerapkan komitmen mereka pada Deklarasi Sekolah Aman, dan hal ini menimbulkan efek positif, di antara lain:

- Beberapa negara pendukung telah menyatakan rencana mereka untuk menggunakan dan menerapkan Pedoman, termasuk Chili, Italia, Luxembourg, Selandia Baru, Norwegia, dan Slovenia.
- Setelah Republik Afrika Tengah mengesahkan Deklarasi tersebut, misi penjaga perdamaian PBB di sana mengeluarkan instruksi berdasarkan Pedoman, bahwa “penggunaan sekolah atau universitas secara militer tidak diperbolehkan.” Sejak itu, mereka memastikan sekolah-sekolah yang digunakan oleh kelompok bersenjata telah dikosongkan.
- Di Afghanistan, Menteri Pendidikan telah menggunakan dukungan mereka atas Deklarasi dan Pedoman untuk mengadvokasikan penghapusan pos pemeriksaan dan basis militer dari sekolah-sekolah dan pusat pendidikan.
- Negara-negara yang mendukung telah membantu upaya-upaya pengumpulan data yang relevan dan dapat diandalkan mengenai serangan-serangan terhadap dan penggunaan sekolah secara militer. Contohnya, negara-negara pendukung membantu Klaster Pendidikan Global (Global



Education Cluster) dan Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan (MRM) mengenai pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata.

- Sehubungan dengan komitmen untuk mengembangkan, mengadopsi, dan mempromosikan pendekatan-pendekatan sensitif konflik dalam pendidikan, Kementerian Pendidikan Sudan Selatan kini bekerja sama dengan UNICEF dan UNESCO untuk mengintegrasikan pendidikan sensitif konflik dalam kebijakan mereka.
- Sebagai contoh, untuk memastikan kelanjutan pendidikan selama konflik bersenjata, di Nigeria, pendidikan alternatif dihantarkan lewat program radio untuk anak-anak yang tidak bisa pergi sekolah karena situasi tidak aman.
- Nigeria menerapkan beberapa langkah untuk meningkatkan keamanan sekolah, di antaranya: membangun parit di sekitar sekolah; memasang penerangan keamanan di seluruh area sekolah; mengerahkan personel militer bersenjata untuk patroli dengan kendaraan dan berjalan kaki; dan menyiapkan penghalang di jalan-jalan. Mengakui, sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman, bahwa kehadiran personel militer di sekolah dapat menimbulkan risiko bagi anak-anak, sehingga penghalang-penghalang ditempatkan di area sekitar sekolah alih-alih di dalam area sekolah.
- Banyak negara pendukung memberikan bantuan untuk program-program perlindungan dan pendidikan anak dalam situasi konflik, seperti UNICEF dan Sayangi Tunas Cilik (Save the Children).
- Negara-negara pendukung membantu usaha Dewan Keamanan PBB dan SRSG untuk Anak-Anak dan Konflik Bersenjata, serta badan-badan PBB lainnya, yang merupakan komitmen tersendiri dalam Deklarasi tersebut. Salah satu cara untuk mendukung kerja SRSG adalah memberikan dukungan finansial untuk kantornya, yang mana telah dilakukan Luxembourg dan Spanyol.
- Negara-negara pendukung juga telah membahas Deklarasi atau Pedoman dalam diskusi-diskusi mengenai anak-anak dan konflik bersenjata, dan mengenai perlindungan warga sipil.
- Pada 2015, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2225 di bawah Presiden Malaysia, dan dengan dukungan dari sesama negara pendukung dan anggota Dewan Angola, Chad, Chili, Yordania, Selandia Baru, Nigeria, dan Spanyol. Dalam resolusi tersebut, Dewan menyampaikan kekhawatiran mendalam bahwa penggunaan sekolah secara militer yang berlawanan dengan hukum internasional yang berlaku, dapat menjadikan sekolah sasaran militer yang sah, sehingga membahayakan keselamatan anak-anak. Hal tersebut mendorong negara-negara mengambil langkah konkret supaya menghindari penggunaan sekolah oleh pasukan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata.
- Negara-negara pendukung juga telah bersepakat untuk bertemu secara rutin, untuk mengulas dan mengagih praktik-praktik seputar penerapan Deklarasi dan Pedoman. Pada November 2016, Norwegia, Republik Sierra Leone dan Zambia bersama-sama mengadakan loka karya regional yang berfokus pada penerapan Pedoman negara-negara Uni Afrika. Perwakilan dari kementerian-kementerian pertahanan dan pendidikan dan pasukan nasional bersenjata 14 dari 17 negara-negara pendukung di Afrika bertemu untuk berbagi pengalaman dan langkah-langkah.



Menurut sebuah survei yang dilakukan pada 2016, pada anggota-anggota **Gugus Pendidikan (Education Clusters)** yang bekerja di negara-negara yang terkena dampak konflik di dunia, Deklarasi Sekolah Aman merupakan sumber yang dinilai “sangat membantu” terhadap pekerjaan mereka, yaitu memastikan kelangsungan pendidikan dalam situasi konflik.

Mengapa bekerja sama dengan kelompok-kelompok bersenjata non-negara penting?

Deklarasi Sekolah Aman adalah dokumen politis di mana negara-negara menyampaikan dukungan politis mereka yang luas atas perlindungan pendidikan selama konflik bersenjata dan secara resmi mendukung Pedoman. Sementara itu, Pedoman itu sendiri merupakan sarana praktis yang tersedia bagi semua. Pedoman ini dapat diterapkan atau digunakan oleh aktor manapun yang tertarik di luar kerangka kerja Deklarasi Sekolah Aman, misalnya oleh kelompok-kelompok bersenjata non-negara.

Pedoman berlaku bagi semua pihak yang berjuang dalam konflik bersenjata dan tidak hanya pasukan-pasukan bersenjata milik negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi kelompok-kelompok bersenjata non-negara untuk mengenal Pedoman dan mengintegrasikannya ke dalam aturan-aturan militer. Geneva Call adalah organisasi yang bekerjasama dengan kelompok bersenjata non-negara untuk memastikan mereka mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Mereka kini tengah melatih kelompok tersebut (termasuk anggota kelompok oposisi di Suriah) untuk mempraktikkan rencana perlindungan sekolah dari serangan militer dan agar bangunan tersebut tidak digunakan oleh militer.

Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia telah menyatakan “bahwa sekolah seharusnya berfungsi sebagai tempat berlindung. Maka, anak-anak akan dihadapkan pada situasi rentan penyerangan dan mengganggu hak mereka atas pendidikan, jika gedung sekolah digunakan untuk tujuan militer.”

Kenapa pelajar, guru, sekolah dan kampus kerap diserang?

Pelajar, guru, sekolah dan kampus diserang oleh kelompok non-negara dan aparat bersenjata pemerintah untuk berbagai tujuan, termasuk:

- Untuk menghancurkan simbol pemerintahan dan bagi kelompok anti-pemerintah, untuk memperlihatkan kekuasaan atas suatu daerah;
- Untuk menghalangi pendidikan bagi anak perempuan, atau jenis pendidikan lain yang dianggap mengajarkan nilai budaya atau agama asing, sejarah yang bias, atau instruksi bahasa yang tidak dikenal;
- Untuk membatasi aktivitas serikat pekerja dan kebebasan akademik;
- Untuk menculik anak-anak dan menggunakan mereka sebagai pasukan, budak seks atau penyalur logistik dalam operasi militer, dan meminta tebusan dari penculikan pelajar serta guru
- Karena sekolah atau kampus tengah digunakan oleh kekuatan militer lawan;
- Timbal balik atas tanpa pandang bulu atau yang dinilai tidak sepadan.



Sidang Umum PBB menyerukan pada setiap negara untuk “mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi sekolah dan orang-orang yang berkaitan dengan sekolah dari serangan dalam konflik bersenjata, dan untuk mengambil langkah yang tidak menghalangi akses anak-anak pada pendidikan.”

Bagaimana cara militer menggunakan sekolah dan kampus untuk tujuan mereka?

Di tengah konflik bersenjata, sekolah dan kampus seringkali digunakan oleh pasukan bersenjata dan kelompok bersenjata non-negara sebagai markas, barak dan perlindungan sementara. Sebagai titik pengamatan menyerang atau bertahan, gudang senjata, penjara dan pusat interogasi. Ruang kelas, lapangan sekolah, dan kelas kampus juga digunakan untuk latihan militer dan merekrut paksa anak-anak ke dalam kelompok bersenjata. Terkadang sekolah dan kampus diambil alih sepenuhnya, kemudian para murid diusir. Di lain waktu, hanya sebagian dari fasilitas pendidikan yang digunakan untuk tujuan militer.

Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian PBB memastikan pasukan infantri batalion mematuhi syarat bahwa “anak-anak harus dijauhkan dari bahaya” dan “sekolah seharusnya tidak digunakan dalam operasi militer”.

Apa Saja Konsekuensi Penggunaan Sekolah dan Kampus Untuk Tujuan Militer?

Kehadiran pasukan tentara dan senjata di dalam sekolah bisa mengubah tempat ini menjadi sasaran serangan lawan. Para murid juga berisiko cedera berat atau meninggal dunia, mereka mungkin juga direkrut atau menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan para tentara atau menyaksikan kekerasan. Keselamatan mereka mungkin terancam di dekat senjata dan bahan peledak. Semua risiko ini berdampak signifikan terhadap psikis para murid atau guru. Penggunaan sekolah untuk tujuan militer juga bisa merusak atau menghancurkan lingkungannya. Sekolah juga bisa kehilangan bahan ajar, memengaruhi kualitas pendidikan mereka. Gugus Pendidikan Global (IASC) memprediksikan bahwa perbaikan kerusakan setelah digunakan secara militer di beberapa sekolah Sudan Selatan menghabiskan biaya sekitar \$67,000, per sekolah. Penggunaan sekolah untuk tujuan militer bisa menurunkan angka pendaftaran murid baru, kenaikan kelas dan ketidakhadiran para guru. Para murid mungkin keluar dari sekolah, mengalami interupsi pengajaran atau pindah ke sekolah lain yang seringkali menyebabkan kepadatan berlebihan. Anak-anak perempuan terkena dampak terbesar, pasalnya para orang tua tidak berani menyekolahkan anak perempuan ke sekolah yang diduduki kelompok bersenjata.

Penggunaan sekolah secara militer mempunyai kerugian signifikan untuk kelompok bersenjata. Penggunaan sekolah oleh anggota militer mudah dicitrakan oleh warga lokal dan komunitas internasional sebagai kekejaman terhadap anak-anak dan kegiatan pendidikan. Hal ini akan dieksploitasi oleh kekuatan lawan untuk digunakan dalam perang informasi negatif. Terlebih, di negara yang menjalankan Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Dewan Keamanan PBB, kelompok seperti ini akan dimuat dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang anak dan konflik bersenjata untuk Dewan Keamanan. Dengan demikian, menarik perhatian negatif publik dan berpotensi direspon masyarakat internasional.



Perlindungan terhadap pendidikan memiliki **sejarah panjang**. Pada tahun 333, Kaisar Roma Konstantine menyatakan bahwa profesor sastra dibebaskan dari kewajiban menerima tentara, karena “mereka lebih mudah melatih lebih banyak murid lagi di humaniora.”

Apa Itu Koalisi Global untuk Perlindungan Pendidikan dari Serangan Bersenjata?

Koalisi Global untuk Perlindungan Pendidikan dari Serangan Bersenjata didirikan pada tahun 2010 oleh berbagai organisasi di bidang perguruan tinggi, pelindung, HAM internasional dan hukum kemanusiaan internasional serta pendidikan di negara yang terdampak konflik dan dalam keadaan darurat. Mereka mengkhawatirkan serangan terhadap institusi pendidikan, para murid dan staf pengajar di negara terdampak konflik dan rawan. GCPEA (KGPPSB) terdiri dari organisasi internasional, seperti CARA (DABT, Dewan Akademik Berisiko Tinggi), Pengawas Hak Asasi Manusia, Institut Pendidikan Internasional/Dana Penyelamat Sarjana IIE, Dewan Pengungsi Norwegia, Lindungi Pendidikan dalam Kondisi Rawan dan Konflik, SAIH (BDIPAN, Bantuan Dana Internasional Pelajar dan Akademik Norwegia), Selamatkan Anak-Anak, Jaringan Sarjana Berisiko Tinggi, UNESCO, UNHCR, UNICEF, dan Anak-Anak Perang Belanda. GCPEA (KGPPSB) adalah proyek Pusat Tides, sebuah organisasi nirlaba 501(c)(3).

Informasi Lebih Lanjut

Beberapa sumber mengenai Deklarasi dan Pedoman tersedia di situs resmi Koalisi Global untuk Perlindungan Pendidikan dari Serangan Bersenjata, terutama laman ini:

www.protectingeducation.org/guidelines

Beberapa *toolkit* pemandu untuk memahami dan mengejawantahkan Pedoman, yang diproduksi lewat rekanan Koalisi Global untuk Perlindungan Pendidikan dari Serangan Bersenjata dan Inisiatif Tentara Anak-Anak Roméo Dallaire, tersedia di sini:

<http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/toolkit.pdf>

Panduan kementerian dari *A Menu of Actions* sebagai usaha mereka untuk melindungi pendidikan dari serangan bersenjata serta melindungi sekolah dan kampus dari penggunaan militer, tersedia di sini :

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/what_ministries.pdf